
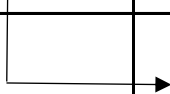
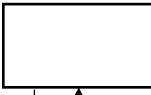


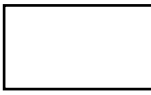

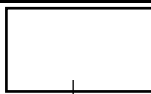

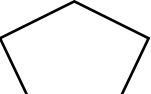






 <p><b>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>  <b>BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU</b>  <b>HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>  <b>BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN</b>  <b>KEAMANAN HASIL PERIKANAN TARAKAN</b></p>		<p>Nomor SOP : B.284/BKIPM.TRK/KP.440/V/2024  Tgl Pembuatan : 27 Mei 2024  Tgl Efektif : 3 Juni 2024  Tgl Pengesahan :  Disahkan Oleh : Plt Kepala Balai KIPM Tarakan</p> <p>  M. Roy Pahlavi  NIP. 19790605 200312 1 004</p> <p>Nama SOP : Pendokumentasian Informasi Publik dan Secara Online</p>																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dasar Hukum</th> <th colspan="2">Kualifikasi Pelaksanaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</td> <td>1</td> <td>Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</td> <td>2</td> <td>Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian</td> <td>3</td> <td>Memiliki skil komunikasi</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KPPedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur</td> <td>4</td> <td>Kemampuan pendokumentasian informasi</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan		1	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi	2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik	3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian	3	Memiliki skil komunikasi	4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KPPedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi	5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik			6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan		
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan																													
1	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi																												
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik																												
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian	3	Memiliki skil komunikasi																												
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KPPedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur	4	Kemampuan pendokumentasian informasi																												
5	Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik																														
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 1/PPID-KKP/III/2024 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Keterkaitan</th> <th colspan="2">Peralatan Perlengkapan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan</td> <td>1</td> <td>Laptop, Komputer, ATK</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SOP Pengelolaan Permohonan Informasi</td> <td>2</td> <td>Jaringan Internet</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SOP Uji Konsekuensi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Keterkaitan		Peralatan Perlengkapan		1	SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan	1	Laptop, Komputer, ATK	2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2	Jaringan Internet	3	SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi			4	SOP Uji Konsekuensi			5	SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)			6	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik		
Keterkaitan		Peralatan Perlengkapan																													
1	SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan	1	Laptop, Komputer, ATK																												
2	SOP Pengelolaan Permohonan Informasi	2	Jaringan Internet																												
3	SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi																														
4	SOP Uji Konsekuensi																														
5	SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)																														
6	SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Peringatan</th> <th colspan="2">Pencatatan dan Pendataan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>Buku Tamu/Agenda</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2</td> <td>Daftar Pemohon</td> </tr> </tbody> </table>				Peringatan		Pencatatan dan Pendataan				1	Buku Tamu/Agenda			2	Daftar Pemohon																
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan																													
		1	Buku Tamu/Agenda																												
		2	Daftar Pemohon																												

No	Kegiatan	Pelaksana		Arsiparis	Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Layanan Informasi	PPID		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Identifikasi terkait informasi yang akan didokumentasikan (informasi dikecualikan) pada unit di lingkungan KKP				Komputer, ATK	5 menit	Dokumen	Pemohon datang langsung
2	Melakukan koordinasi dengan pejabat PPID dalam menghimpun serta mendokumentasikan data untuk daftar informasi dikecualikan				Komputer, jaringan internet	15 menit	Dokumen	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi
3	Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam melakukan dokumentasi daftar informasi dikecualikan				Komputer, ATK	5 menit	Dokumen	
4	Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber dalam mendokumentasikan daftar informasi dikecualikan				Komputer, ATK, jaringan internet	1 hari kerja	Dokumen/arsip	
5	Mengolah dan menyusun data hasil informasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk soft file				Komputer, jaringan internet	1 hari	Dokumen/arsip	
6	Melaporkan kepada pimpinan PPID hasil informasi yang telah didokumentasikan untuk memperoleh perbaikan atau koreksi				Komputer, ATK	2 hari	Surat/memo	
7	Hasil koreksi dokumen informasi dari pimpinan PPID dipublikasikan melalui website				Komputer, jaringan internet, data/informasi	30 menit	Data dan Informasi Publik	
8	Dokumen informasi disimpan sebagai arsip				Komputer, ATK	15 menit	Arsip	